



Realisasi Penerimaan PPN yang Dideterminasi Oleh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Dian Sulistyorini Wulandari¹, Vista Yulianti²

^{1,2}Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

diansulistyorini@pelitabangsa.ac.id¹, vista.yulianti@pelitabangsa.ac.id²

ARTICLE INFO

Article history:

Received 01 November 2022

Received in Revised 30 April 2023

Accepted 04 Mei 2023

Keyword's : Inflation, Rupiah Exchange Rate, Number Of Taxable Entrepreneurs, Value-Added Tax

ABSTRACT

This study was conducted at Bekasi Madya Tax Office from 2017 to 2021 with the aim of knowing the impact of inflation variables, rupiah exchange rate and number of taxable entrepreneurs on VAT receipts. The population for this study is data on inflation, rupiah exchange rate, number of taxable entrepreneurs, and VAT receipts. The data source used is secondary data from data testing using the SPSS version 25 program. The research method uses a quantitative approach with associative form and multiple linear regression analysis. This study uses the entire population as a sample, so 60 observations are taken. The results of this study indicate that inflation partially has a positive and significant on VAT receipts, the rupiah exchange rate and the number of taxable entrepreneurs partially have no effect on VAT receipts. Inflation, the rupiah exchange rate, and the number of taxable entrepreneurs simultaneously affect VAT receipts at KPP Madya Bekasi.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madhya Bekasi pada periode tahun 2017–2021 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan PPN. Populasi penelitian ini adalah data inflasi, nilai tukar rupiah, jumlah pengusaha kena pajak, dan penerimaan PPN. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan pengujian data menggunakan program SPSS versi 25. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk asosiatif dan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan seluruh populasi sebagai sampel, sehingga diambil 60 observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Madya Bekasi.

AKUISISI : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000

E-mail address: diansulistyorini@pelitabangsa.ac.id

Peer review under responsibility of *Akuisisi : Accounting Journal*. [2477-2984](https://doi.org/10.24217/2477-2984).

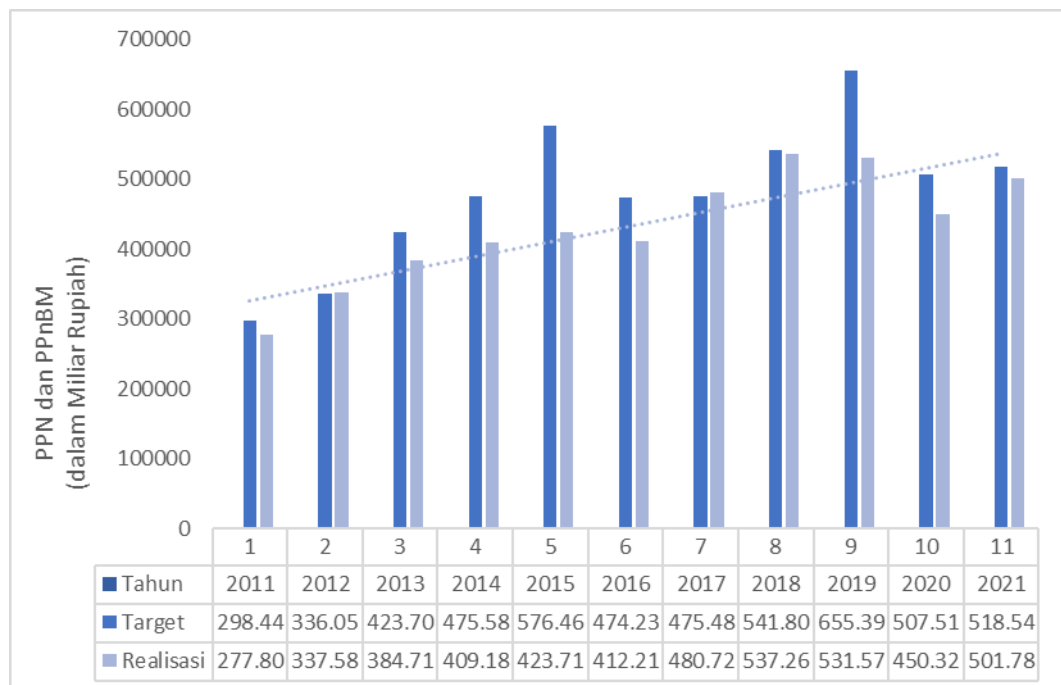
<http://dx.doi.org/10.24217/2477-2984>

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Tujuan utama kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlah tersebut meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan (Pujiwidodo, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Undang-Undang Republik Indonesia, 2015) menyebutkan bahwa pendapatan negara yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak meliputi pajak dalam negeri dan pajak dari perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P3), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, dan pajak lainnya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam beberapa tahun terakhir sektor pajak memberikan kontribusi besar dalam penerimaan negara. Sebagian besar penerimaan yang didapat untuk menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara agar tidak bergantung dari pendapatan sumber daya alam.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penyumbang terbesar kedua bagi pendapatan negara setelah pajak penghasilan. Besarnya kontribusi PPN terhadap penerimaan negara tidak terlepas dari dukungan pemerintah untuk memfasilitasi pelaksanaan pemungutan PPN. Kebijakan tersebut dapat berupa penyempurnaan peraturan perpajakan atau penerbitan kebijakan fiskal yang dapat mendorong transaksi ekonomi sehingga memacu arus barang dan jasa yang merupakan objek PPN (Pane & Avelina, 2022). Gambar 1 menyajikan realisasi penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Indonesia tahun 2011–2021 sebagai berikut:



Gambar 1. Realisasi Penerimaan Negara Sektor PPN dan PPnBM Tahun 2011-2021

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia yang dimulai pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 21,52%. Terhitung pada tahun 2011 penerimaan negara dari sektor PPN menyumbang senilai 227.800,00 miliar rupiah, meningkat senilai 337.584,60 miliar rupiah di tahun 2012. Peningkatan penerimaan pajak terus berlanjut sampai di tahun 2015 meskipun dilihat dari prosentase penerimaan cenderung menurun disetiap tahunnya. Tahun 2016 penerimaan pajak menurun sebesar 2,71% dari realisasi tahun 2015 senilai 423.710,82 miliar rupiah menjadi 412.213,50 miliar rupiah. Hal ini disebabkan karena melambatnya laju perekonomian Indonesia dan penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur) yang belum berdampak signifikan. Penurunan penerimaan pajak terjadi untuk kedua kalinya selama sebelas tahun terakhir yaitu di tahun 2019 senilai 531.577,30 miliar rupiah dan tahun 2020 senilai 450.328,06 miliar rupiah. Prosentase turunnya penerimaan negara yang berasal dari PPN tergambar jelas tahun 2020 sebesar 15,28%, disaat pandemi melanda dunia yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian dan berdampak pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak di tahun 2021 mulai meningkat sebesar 11,43% dengan nilai 501.780,00 miliar rupiah yang menjadi angin segar bagi pemerintah atas kebijakan yang telah dilakukan untuk memulihkan perekonomian Indonesia.

Hakekatnya Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009) merupakan pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang dikonsumsi dan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Artinya semakin banyak barang dan jasa yang dikonsumsi, maka akan semakin meningkat pula penerimaan pajaknya. Sejalan dengan Wijayanti dalam (Sinambela & Rahmawati, 2019) mengungkapkan bahwa kegiatan ekonomi utama masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia merupakan kegiatan konsumsi yang memiliki hubungan erat dengan penerimaan PPN. Diyakini semakin bertambah kegiatan konsumsi yang dilakukan masyarakat maka akan semakin meningkat pula penerimaan negara dari sektor PPN dan sebaliknya.

Beberapa faktor yang mampu mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan penelitian terdahulu antara lain, inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP yang terdaftar. Variabel pertama dalam penelitian ini dilihat dari permasalahan ekonomi makro yaitu inflasi. Kegiatan ekonomi yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara, maka dibutuhkannya keseimbangan faktor internal dan eksternal yang mampu menjaga sumber penerimaan PPN terkait dengan kegiatan konsumsi. Faktor eksternal cenderung bersifat fluktuatif dan jika terus berlanjut dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan konsumsi. Gejala ekonomi ini menurunkan daya beli konsumsi, investasi dan ekspor impor yang juga akan berdampak pada penerimaan PPN. Stabilitas dan indikator dari ekonomi makro seperti inflasi dan nilai tukar rupiah berperan dalam hal tersebut. Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang atau jasa di pasar pada masa tertentu secara masif dan beriringan dengan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada penerimaan PPN (Junianto et al., 2020).

Secara historis tingkat inflasi Indonesia dalam lima tahun terakhir dapat dikatakan terkendali dengan angka 2,73%. Hal tersebut bermula pada tahun 2015 tingkat inflasi mulai menurun seiring waktu jika dibandingkan pada periode 2005-2014 yang mencapai angka 8,5% dan lebih tinggi dibanding dengan negara-negara berkembang lainnya. Inflasi yang terjadi di Indonesia merupakan sebagian permasalahan ekonomi yang menjadi salah satu perhatian masyarakat dan pemerintah lantaran sifatnya fluktuasi dan tidak dapat diprediksi. Pada Mei 2022 Badan Pusat Statistik mencatat inflasi mencapai angka 3,55% yang disebabkan oleh kenaikan harga oleh kelompok pengeluaran seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,78% (Badan Pusat Statistik, 2022).

Variabel kedua dari ekonomi makro lainnya dalam penelitian ini adalah kondisi nilai tukar, yang merupakan jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing, Murni dalam (Hibatullah & Sofianty, 2022). Ketika nilai tukar domestik mengalami penurunan maka harga barang atau jasa akan mengalami peningkatan dan berpengaruh terhadap turunnya konsumsi masyarakat. Apabila kondisi terus berlanjut akan berdampak negatif bagi

perusahaan dalam negeri yang melakukan kegiatan usahanya yang melibatkan impor ekspor, dan kemungkinan besar akan berlanjut pada harga eceran yang ditawarkan kepada konsumen semakin tinggi sehingga menyebabkan penurunan daya beli konsumen sekaligus penerimaan PPN.

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah jumlah PKP. Faktor internal ini dipengaruhi oleh kebijakan di bidang perpajakan membutuhkan kerja sama antar berbagai pihak terkait untuk menjamin keselarasan penerimaan pajak. Wajib pajak dituntut tertib dan patuh dalam memungut, menyetor dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subjek dari Pajak Pertambahan Nilai yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP), PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak (Ermadiani et al., 2021). Berdasarkan hal ini PKP yang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan terutama Pajak Pertambahan Nilai menjadi pendorong agar penerimaan negara berasal dari PPN meningkat.

Penelitian ini dirasa perlu dilakukan karena diketahui PPN berperan secara signifikan sebagai sumber penerimaan negara agar kedepannya mampu menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk mengidentifikasi sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan PPN serta adanya inkonsistensi dari penelitian-penelitian terdahulu.

Menurut (Pahala & Muslih, 2020) dalam penelitiannya menerangkan bahwa “Inflasi berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN, dimana jika terjadi kenaikan tingkat inflasi, maka akan meningkatkan harga jual yang merupakan dasar pengenaan pajak (DPP) PPN”. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh (Hibatullah & Sofianty, 2022) bahwa “Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Artinya jika tingkat inflasi naik maka akan meningkatkan harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Namun pendapat berbeda disampaikan oleh (Puspitha & Supadmi, 2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa “Inflasi tidak berpengaruh signifikan pada penerimaan PPN. Konsumsi dan daya beli masyarakat akan berkurang karena inflasi menurunkan pendapatan riil dan pada umumnya kenaikan harga-harga tidak akan terjadi secara cepat sehingga masyarakat akan cenderung melakukan *saving* pada saat terjadi inflasi”.

Menurut (Sapridawati et al., 2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa “Nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan nilai tukar rupiah memengaruhi harga BKP/JKP, terutama BKP/JKP yang membutuhkan barang modal dari luar negeri dan menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat akan naik yang selanjutnya memberikan pengaruh terhadap penerimaan PPN”. Sejalan dengan tanggapan dari (Junianto et al., 2020) yang menjelaskan bahwa “Nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan PPN sehingga meningkatnya nilai tukar rupiah akan beriringan dengan kenaikan penerimaan PPN dan sebaliknya”. Perbedaan pendapat diungkapkan oleh (Sinambela & Rahmawati, 2019) dalam penelitiannya bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan penetapan nilai tukar rupiah oleh menteri keuangan mampu menciptakan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat.

Menurut (Ilham et al., 2020) menyatakan bahwa “Jumlah PKP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan dengan bertambahnya jumlah PKP, maka penerimaan PPN akan bertambah”. Pendapat lain yang didukung oleh penelitian (Windha & Aulia, 2021) menjelaskan bahwa jumlah PKP berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Kedua pendapat tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sinambela & Rahmawati, 2019), “Jumlah PKP tidak berpengaruh secara signifikan karena dipengaruhi oleh pemakaian jasa konsultan perpajakan sehingga pajak yang dibayar seminimal mungkin.”

Berdasarkan fenomena dan perbedaan pendapat di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian

Pengumpulan data yang dilakukan penulis diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data inflasi, melalui situs Bank Indonesia yang dikeluarkan Menteri Keuangan untuk data nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, dan dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi untuk memperoleh data jumlah PKP terdaftar yang terdiri dari WP PKP Badan dan Orang Pribadi serta realisasi penerimaan PPN.

Jenis penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengukur besarnya pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini melibatkan variabel yang terdiri dari satu variabel terikat (*dependen*) dan tiga variabel bebas (*independen*). Variabel *independen* dalam penelitian ini terdiri dari Inflasi (X1), Nilai Tukar Rupiah (X2), dan Jumlah PKP (X3) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Adapun definisi tiap-tiap variabel sebagai berikut:

Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependen*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas (Paramita et al., 2021). Penelitian ini memiliki variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi ekonomi yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Maulidya et al., 2021). Pajak Pertambahan Nilai tergolong ke dalam pajak tidak langsung, sehingga dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Perhitungan PPN didasarkan pada rumus :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif PPN} \dots\dots\dots (1)$$

Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Paramita et al., 2021). Variabel bebas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Inflasi (X1)

Inflasi merupakan suatu keadaan perubahan harga barang atau jasa mengalami kenaikan secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Apabila tingkat inflasi rendah dan stabil, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian suatu negara dianggap telah dikelola dengan baik. Bagi masyarakat, inflasi memengaruhi daya beli dan kesejahteraan hidup, serta sebagai faktor penentu pengambilan keputusan bagi pengusaha. Oleh karena itu, bank sentral termasuk Bank Indonesia beserta pemerintah bekerja sama untuk menstabilkan tingkat inflasi dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut (Parera, 2021) perhitungan inflasi melalui indeks harga konsumen (IHK) dirumuskan:

$$\text{INF}_n = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{(n-1)}}{\text{IHK}_{(n-1)}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

INF_n = Inflasi pada bulan atau tahun ke-n

IHK_n = Indeks harga konsumen periode n

$\text{IHK}_{(n-1)}$ = Indeks harga konsumen periode n-1

2. Nilai Tukar Rupiah (X2)

Kurs atau nilai tukar merupakan harga sebuah mata uang dari negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lain (Arifin et al., 2016). Mata uang memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai alat tukar yang sah dan simbol kedaulatan. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sering kali mengalami fluktuasi

dari waktu ke waktu, terutama terhadap mata uang negara-negara yang banyak melakukan transaksi ekonomi dengan negara Indonesia. Menurut (Dinar & Hasan, 2018) pengukuran nilai tukar dapat dilakukan dengan perhitungan kurs tengah menggunakan rumus:

$$Kurs\ Tengah = \frac{Kj + Kb}{2} \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

Kj = kurs jual

Kb = kurs beli

3. Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Tahun 1984 tentang PPN dan perubahannya. PKP dapat berlaku pada pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak (WP PKP) terdiri dari WP orang pribadi dan WP badan. Jumlah PKP dapat dirumuskan dengan:

$$Jumlah\ PKP = WP\ OP + WP\ Badan \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan:

WP OP = Wajib pajak orang pribadi

WP Badan = Wajib pajak badan

Populasi Data dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan ciri yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu data inflasi didapat dari survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), data nilai tukar rupiah diperoleh dari Bank Indonesia, data jumlah PKP dan realisasi penerimaan PPN yang didapat dari KPP Madya Bekasi periode waktu Januari 2017–Desember 2021.

Sampel

Dalam penelitian kuantitatif, menurut (Sugiyono, 2018) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Data penelitian ini berupa *time series* dalam kurun waktu 2017-2021 dengan data bulanan maka jumlah sampelnya sebanyak 60 pengamatan.

Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian dapat ditentukan dengan berbagai teknik sampling yang akan digunakan. Teknik sampling pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*. Pengambilan sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik *Nonprobability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Paramita et al., 2021). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh atau sensus, yang mana seluruh populasi menjadi data penelitian (sampel). Hal ini dikarenakan penulis ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi atau sumber lain, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis statistik melalui pendekatan regresi linear berganda, yaitu suatu analisis yang digunakan sebagai alat prediksi besaran nilai pengaruh dua atau lebih variabel bebas (*independent variable*) terhadap satu variabel terikat (*dependent variable*)

(Muhid, 2019). Sebelum melakukan hipotesis dengan analisis regresi linear berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, uji t (uji parsial), uji F (uji simultan), dan uji koefisien determinan (uji R²). Analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS for Windows.

Analisis Regresi Linear Berganda

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik yakni analisis regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk mengukur efek dua atau lebih variabel bebas pada variabel terikat tunggal yang diukur pada skala rasio (Ghozali, 2018). Model persamaan analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan:

- Y = Realisasi Penerimaan PPN
- a = Konstanta
- b₁ = Koefisien Regresi Tingkat Inflasi
- X₁ = Tingkat Inflasi
- b₂ = Koefisien Regresi Nilai Tukar Rupiah
- X₂ = Nilai Tukar Rupiah
- b₃ = Koefisien Regresi Jumlah PKP
- X₃ = Jumlah PKP
- e = Error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi, Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, dan Bank Indonesia periode 2017-2021. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder berupa laporan realisasi dengan pengambilan data *time series* bulanan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yang diperoleh melalui situs resmi setiap instansi. Metode Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh, sehingga semua populasi dalam penelitian ini digunakan sebagai sampel dengan total sebanyak 60 pengamatan.

Hasil Penelitian

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Uji statistik deskriptif ini menggunakan data minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi untuk variabel inflasi, nilai tukar rupiah, jumlah PKP, dan penerimaan PPN. Hasil uji statistik deskriptif dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INFLASI	60	1,35	4,59	3,2668	0,90062
NTR	60	13.298,00	15.867,00	14.140,65	536,604
PKP	60	29,00	189,00	70,60	35,52
PPN	60	526.245,13	933.257,41	707.414,89	127.998,56
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data Penelitian SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 1 penjelasan masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Variabel Inflasi (X1) memiliki nilai minimum sebesar 1,35 dan nilai maksimum sebesar 4,59 dari keseluruhan data penelitian. Nilai rata-rata (*mean*) variabel inflasi sebesar 3,2668 dengan standar deviasi 0,90062. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata (*mean*) menjelaskan bahwa sebaran data sudah merata atau perbedaan data satu dengan data lainnya tidak tergolong tinggi.
2. Variabel Nilai Tukar Rupiah (X2) memiliki nilai minimum sebesar 13.298 dan nilai maksimum sebesar 15.867 dari keseluruhan data penelitian. Nilai rata-rata (*mean*) variabel inflasi sebesar 14.140,65 dengan standar deviasi 536,604. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata (*mean*) menjelaskan bahwa sebaran data sudah merata atau perbedaan data satu dengan data lainnya tidak tergolong tinggi.
3. Variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X3) memiliki nilai minimum sebesar 29 dan nilai maksimum sebesar 189 dari keseluruhan data penelitian. Nilai rata-rata (*mean*) variabel inflasi sebesar 70,60 dengan standar deviasi 35,52. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata (*mean*) menjelaskan bahwa sebaran data sudah merata atau perbedaan data satu dengan data lainnya tidak tergolong tinggi.
4. Variabel Pajak Pertambahan Nilai (Y) memiliki nilai minimum sebesar 526.245,13 dan nilai maksimum sebesar 933.257,41 dari keseluruhan data penelitian. Nilai rata-rata (*mean*) variabel inflasi sebesar 707.414,89 dengan standar deviasi 127.998,56 Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata (*mean*) menjelaskan bahwa sebaran data sudah merata atau perbedaan data satu dengan data lainnya tidak tergolong tinggi.

Hasil Uji Asumsi Klasik

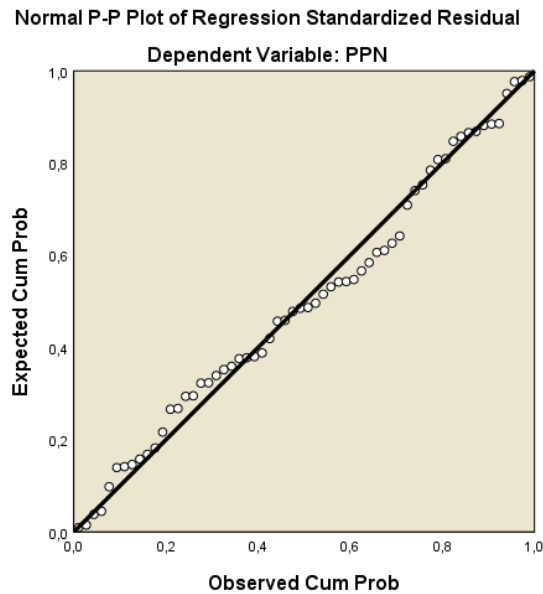
Untuk mengetahui apakah suatu model regresi memenuhi syarat pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak dalam model regresi. Uji normalitas dalam penelitian ini menguji variabel independen terhadap variabel dependen dengan hasil uji sebagai berikut:

1. Uji *P-P Plot of regression standardized residual*

Uji normalitas residual dengan menggunakan metode grafik dapat dilihat pada grafik *P-P Plot of regression standardized residual*. Pengambilan keputusan data variabel dikatakan berdistribusi normal, jika titik-titik menyebar pada sekitar garis dan mengikuti garis diagonal.



Gambar 2. Hasil Uji P-Plot

Sumber: Olah Data SPSS 25,2022

Berdasarkan gambar 2 hasil uji normalitas metode grafik P-Plot, dapat disimpulkan bahwa variabel data berdistribusi normal karena setiap titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal.

2. Uji *Kolmogrov-Smirnov*

Uji normalitas dengan metode *Kolmogrov-Smirnov* dapat dideteksi dengan melihat nilai signifikan residual. Apabila nilai signifikan pada *Kolmogrov-Smirnov* lebih dari 0,05 ($\text{sig} \geq 0,05$) maka nilai residual berdistribusi normal. Hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,000000
	Std. Deviation	93014,4645
Most Extreme Differences	Absolute	0,071
	Positive	0,071
	Negative	-0,061
Test Statistic		0,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Olah Data SPSS 25, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas metode *Kolmogorov Smirnov* pada tabel 2 menunjukkan bahwa data residual penelitian berdistribusi normal. Hal ini disebabkan *Asymp. Sig. (2-tailed)* memiliki nilai sebesar 0,200 dan lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0,05.

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam suatu model regresi. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF dan nilai *tolerance* dari masing-masing variabel. Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 , sementara variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 . Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
INFLASI	0,600	1,667
NTR	0,966	1,035
PKP	0,602	1,661

a. Dependent Variable: PPN

Sumber: Olah Data SPSS 25, 2022

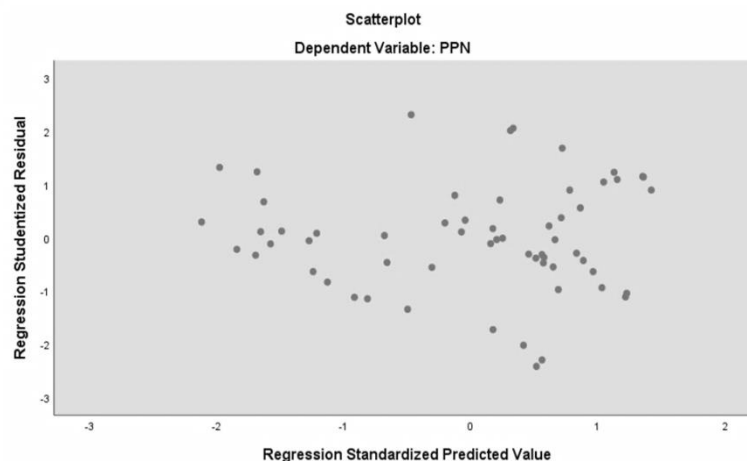
Berdasarkan tabel 3 *Coefficients^a* menunjukkan bahwa nilai VIF variabel Inflasi sebesar 1,667. Nilai VIF pada variabel Nilai Tukar Rupiah sebesar 1,035 dan nilai VIF pada variabel Pengusaha Kena Pajak sebesar 1,661. Hal ini menjelaskan dari ketiga variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10. Tabel 4.3 juga menerangkan variabel Inflasi memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,600, variabel Nilai Tukar Rupiah memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,966, dan variabel Pengusaha Kena Pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,602. Artinya ketiga variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data penelitian yang dianalisis bebas dari gejala multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi memiliki ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode grafik *scatterplot* dan uji *glejser* dengan tingkat kepercayaan 0,05. Hasil untuk masing-masing metode uji heteroskedastisitas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Metode *Scatterplot*

Hasil uji *scatterplot* dapat dikatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas jika titik-titik menyebar secara acak dan menyebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Grafik *scatterplot* dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik Scatter Plot

Sumber: Olah Data SPSS 25, 2022

Berdasarkan uji heteroskedastisitas pada gambar 3 menjelaskan bahwa data penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dibuktikan dari grafik *scatterplot* yang memiliki titik menyebar secara acak dan menyebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y.

2. Uji Glejser

Uji *glejser* dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas pada variabel bebas dalam model regresi. Pengambilan keputusan pada uji ini apabila nilai *Sig.* antara variabel bebas dengan variabel absolut residualnya lebih besar dari 0,05 maka model regresi dinyatakan lolos heteroskedastisitas. Hasil pengujian metode uji *glejser* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-109477,617	208636,865		-0,525	0,602
INFLASI	6510,224	10394,262	0,099	0,626	0,534
NTR	13,878	13,747	0,125	1,01	0,317
PKP	-524,794	263,046	-0,314	-1,995	0,051

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber: Olah Data SPSS 25,2022

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode *uji glejser* dapat dilihat bahwa:

1. Nilai signifikan variabel inflasi sebesar $0,534 > 0,05$ maka model regresi tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.
2. Nilai signifikan variabel nilai tukar rupiah sebesar $0,317 > 0,05$ maka model regresi tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.
3. Nilai signifikan variabel pengusaha kena pajak sebesar $0,051 > 0,05$ maka model regresi tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat kolerasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Analisis dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin Watson* dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	of the Durbin-Watson
1	,419 ^a	,175	,130	77751,67547	2,152

a. Predictors: (Constant), LAG_X3, LAG_X2, LAG_X1

b. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber: Olah Data SPSS 25, 2022

Berdasarkan pada tabel 5 hasil uji autokorelasi diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 2,152 dengan total 60 sampel. Pada tabel DW, $\alpha = 5\%$ diketahui untuk $K=3$ dengan nilai $du = 1,6889$ dan nilai $4-du = 2,3111$, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai $du = 1,6889 < d = 2,152 < 4-du = 2,3111$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada penelitian ini.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Inflasi (X1), Nilai Tukar Rupiah (X2), dan jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) di

Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	888.535,408	357.615,495	
INFLASI	93.518,089	17.816,358	0,658
NTR	-34,393	23,563	-0,144
PKP	-4,083	450,876	-0,001

a. Dependent Variable: PPN

Sumber: Olah Data SPSS 25,2022

Berdasarkan tabel diatas, hasil regresi yang didapat selanjutnya dibuat persamaan linear model regresi berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 888.535,408 + 93.518,089X_1 + (34,393)X_2 + (4,083)X_3 + e \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan:

Y = Penerimaan PPN

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Inflasi

X2 = Nilai Tukar Rupiah

X3 = Jumlah PKP

e = error

Penjelasan dari rumus regresi linear berganda diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta (α) = 888.535,408
 Nilai konstanta menerangkan apabila variabel-variabel bebas (inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP) ditiadakan atau bernilai 0, maka nilai Y (penerimaan PPN) sebesar 888.535,408.
2. Nilai koefisien X1 = 93.518,089
 Nilai koefisien regresi pada variabel inflasi memiliki nilai positif 93.518,089, artinya apabila nilai variabel inflasi mengalami kenaikan 1% maka variabel inflasi akan naik sebesar 93.518,089 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Tanda positif menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel bebas dan variabel terikat.
3. Nilai koefisien X2 = -34,393
 Nilai koefisien regresi pada variabel nilai tukar rupiah memiliki nilai negatif 34,393, artinya apabila nilai variabel nilai tukar rupiah mengalami kenaikan 1% maka mengakibatkan penurunan variabel terikat PPN sebesar 34,393 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Tanda negatif menunjukkan pengaruh yang berlawanan antara variabel bebas dan variabel terikat.
4. Nilai koefisien X3 = -4,083
 Nilai koefisien regresi pada variabel PKP memiliki nilai negatif 4,083, artinya apabila nilai variabel PKP mengalami kenaikan 1% maka variabel PKP akan naik sebesar 4,083 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Tanda negatif menunjukkan pengaruh yang berlawanan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Berdasarkan hasil uji persamaan regresi linear berganda, maka dapat disimpulkan variabel bebas yang paling dominan memengaruhi penerimaan PPN adalah variabel inflasi. Hal ini didasarkan nilai beta terbesar dalam tabel berada di variabel inflasi senilai 93.518,089.

Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dibutuhkan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Metode pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R^2), uji parsial (t), dan uji simultan (F).

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel bebas. Pengujian ini juga digunakan untuk menentukan kuat lemahnya hubungan antar variabel yang diukur dari nilai R^2 . Jika hasil uji menunjukkan nilai $R^2 < 0,5$, maka hubungan antar variabel lemah, jika $R^2 = 0,5$, artinya hubungan sedang, dan jika $R^2 > 0,5$, artinya hubungan kuat. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,687 ^a	0,472	0,444	95473,42056

a. Predictors: (Constant), PKP, NTR, INFLASI

b. Dependent Variable: PPN

Sumber: Olah Data SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,687. Hal ini berarti bahwa variabel bebas (inflasi, nilai tukar rupiah, dan PKP) memiliki hubungan yang cukup kuat dengan variabel terikat (PPN). Selanjutnya hasil nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,472 menunjukkan bahwa korelasi variabel penerimaan PPN di Kota Bekasi mampu dijelaskan variabel bebas (inflasi, nilai tukar rupiah, dan PKP) sebesar 47,2%. Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) sebesar 0,444 yang berarti variasi dari variabel penerimaan PPN mampu dijelaskan sebesar 44,4% oleh variabel bebas (inflasi, nilai tukar rupiah, dan PKP), untuk sisanya sebesar 55,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti atau tidak ada dalam model regresi.

Hasil Uji Parsial (t Test)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat. Suatu variabel bebas secara parsial dikatakan berpengaruh terhadap variabel terikat apabila nilai signifikansi lebih kecil dari α (0,05) dan sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih besar dari α (0,05), maka variabel bebas secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 7. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.		
	B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	888535,408	357615,495			2,485	0,016
	INFLASI	93518,089	17816,358	0,658		5,249	0,000
	NTR	-34,393	23,563	-0,144		-1,460	0,150
	PKP	-4,083	450,876	-0,001		-0,009	0,993

a. Dependent Variable: PPN

Sumber: Olah Data SPSS 25, 2022

Berdasarkan tabel diatas, untuk menguji pengaruh secara parsial diperoleh hasil uji t sebagai berikut:

1. Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Bekasi
 Hasil uji t diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 untuk variabel inflasi, nilai ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai t sebesar 5,249 yang memiliki arti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,249 > 2,00324$). Hal ini menjelaskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Bekasi.
2. Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Bekasi
 Hasil uji t diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,150 untuk variabel nilai tukar rupiah, nilai ini lebih besar dari 0,05 dan nilai t sebesar -1,460 yang memiliki arti $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,460 < 2,00324$). Hal ini menjelaskan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar rupiah tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Kota Bekasi.
3. Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Bekasi
 Hasil uji t diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,993 untuk variabel pengusaha kena pajak, nilai ini lebih besar dari 0,05 dan nilai t sebesar -0,009 yang memiliki arti $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,009 < 2,00324$). Hal ini menjelaskan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengusaha kena pajak tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Kota Bekasi.

Hasil Uji Pengaruh Simultan (F Test)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan apabila hasil uji F memiliki nilai signifikan $< 0,05$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,56184E+11	3	1,52061E+11	16,682	,000 ^b
	Residual	5,1045E+11	56	9115174033		
	Total	9,66634E+11	59			

a. Dependent Variable: PPN
 b. Predictors: (Constant), PKP, NTR, INFLASI

Sumber: Olah Data SPSS 25, 2022

H_0 = Tidak ada ada penaruh signifikan variabel inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Bekasi

H_a = Ada ada pengaruh signifikan variabel inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Bekasi

1. Pengujian dengan tingkat signifikansi
 Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa variabel inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP mempunyai tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Bekasi
2. Pengujian dengan menggunakan perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel}
 Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa variabel inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP mempunyai nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} sebesar $16,682 > 2,77$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Bekasi.

Pembahasan Hipotesis

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel bebas secara parsial maupun simultan dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan PPN

Hipotesis pertama menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Bekasi. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 untuk variabel inflasi, nilai ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai t sebesar 5,249 yang memiliki arti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,249 > 2,00324$). Hal ini menjelaskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Bekasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan (Hibatullah & Sofianty, 2022) yang menerangkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Secara teori kenaikan tingkat inflasi akan memengaruhi harga jual barang dan jasa dimana harga jual barang dan jasa merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Meningkatnya inflasi akan menyebabkan harga jual barang dan jasa mengalami kenaikan yang berdampak pada meningkatnya DPP PPN sehingga besarnya penerimaan PPN akan meningkat pula (Sapridawati et al., 2021). Selain itu, tarif PPN yang berlaku setelah adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah 11% dari harga perolehan. Hal ini yang menyebabkan inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN

Hipotesis kedua menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Bekasi. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,150 untuk variabel nilai tukar rupiah, nilai ini lebih besar dari 0,05 dan nilai t sebesar -1,460 yang memiliki arti $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,460 < 2,00324$). Hal ini menjelaskan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar rupiah tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Kota Bekasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan (Maulidya et al., 2021) yang menerangkan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

Variabel nilai tukar rupiah yang menguat atau terjadi depresiasi tidak banyak dimanfaatkan oleh pengusaha baik dalam kegiatan ekspor atau impor, sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai tidak akan berpengaruh secara signifikan. Lalu dengan adanya kebijakan ekspor yang dikenakan tarif sebesar 0% menjadi salah satu alasan nilai tukar rupiah tidak ada pengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Madya Bekasi.

Pengaruh Jumlah PKP Terhadap Penerimaan PPN

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Bekasi. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,993 untuk variabel pengusaha kena pajak, nilai ini lebih besar dari 0,05 dan nilai t sebesar -0,009 yang memiliki arti $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,009 < 2,00324$). Hal ini menjelaskan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengusaha kena pajak tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Kota Bekasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Sinambela & Rahmawati, 2019) yang menyatakan bahwa jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Penelitian ini membuktikan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh secara signifikan karena dipengaruhi oleh pemakaian jasa konsultan perpajakan sehingga pajak yang dibayarkan dibuat seminimal mungkin. Lalu disebabkan juga oleh pengusaha kena pajak yang

memandel ataupun menunggak dalam membayar pajak, atau pengusaha yang penghasilannya sudah seharusnya dikenakan pajak tidak mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak karena kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan.

Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah PKP

Hipotesis keempat menyatakan bahwa inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Bekasi. Berdasarkan hasil analisis uji F diperoleh tingkat signifikan sebesar signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F_{tabel} sebesar $16,682 > 2,77$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Madya Bekasi. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan di bidang pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi yang berkaitan dalam hal penerimaan PPN. Faktor eksternal meliputi keadaan ekonomi makro seperti inflasi dan nilai tukar rupiah yang cenderung stabil akan memberi dampak meningkatnya aktivitas ekonomi dan berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan PPN yang merupakan pajak atas konsumsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi periode 2017-2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,249 > 2,00324$) dan nilai signifikan lebih kecil dari nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,05$). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat inflasi akan berpengaruh terhadap harga jual barang dan jasa yang merupakan dasar pengenaan pajak berdampak secara langsung terhadap penerimaan PPN. Kedua, nilai tukar rupiah tidak ada berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,460 < 2,00324$) dan nilai signifikan lebih besar dari nilai signifikansi 5% ($0,150 > 0,05$). Hal ini berarti menguatnya nilai tukar rupiah yang tidak dimanfaatkan oleh pengusaha baik kegiatan ekspor maupun impor tidak akan berpengaruh terhadap penerimaan PPN di Kota Bekasi. Ketiga, Jumlah pengusaha kena pajak tidak ada berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,009 < 2,00324$) dan nilai signifikan lebih besar nilai signifikansi 5% ($0,993 > 0,05$). Hal ini dikarenakan pengusaha kena pajak banyak menyewa jasa konsultan sehingga pajak yang dibayarkan ditekan seminimal mungkin, pengusaha kena pajak yang membandel atau menunggak dalam pembayaran pajak, dan pengusaha yang tidak mendaftarkan diri menjadi PKP. Serta, inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah pengusaha kena pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi dengan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} sebesar $16,682 > 2,77$ dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian mengenai penulis mengajukan beberapa saran, bagi Pemerintah terkait variabel ekonomi makro seperti inflasi dan nilai tukar rupiah sebaiknya tetap dijaga kestabilannya agar harga jual barang dan jasa cenderung konstan sehingga daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa dapat terpenuhi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambah hasil produksi, tidak mengimpor barang dari negara yang sedang mengalami krisis ekonomi, dan menetapkan harga maksimum. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pertambahan nilai di Kota Bekasi maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan dengan kegiatan ekstensifikasi agar lebih banyak wajib pajak khususnya pengusaha menengah ke atas yang memenuhi kewajiban perpajakan untuk mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Dan bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar mengembangkan variabel bebas lain seperti Pendapatan Domestik Regional Bruto, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi serta variabel ekonomi makro lainnya yang memiliki pengaruh terhadap kenaikan atau penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal, Masri, H., & Hadi, Syamsul. (2016). Nilai Tukar Dan Kedaulatan Rupiah. *Jurnal Sosio-E-Kons*, 8(1), 62–71.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Januari 2022*. 02, 1–14.
- Boediono. (2018). Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 : Ekonomi Makro. In *BPFE* (Edisi 4). BPFE.
- Dinar, Muhammad, & Hasan, Muhammad. (2018). Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi. In Zaiful (Ed.), *CV. Nur Lina* (Issue 1980). CV. Nur Lina.
- Ermadiani, Ferina, Ika Sasti, Budiman, Anton Indra, & Kesuma, Nilam. (2021). *Perpajakan 1* (Nyimas Rosyada & Ismok (eds.); Issue 142). Noer Fikri.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Mutivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Abadi Tejokusumo (ed.); Edisi 9). Badan Penerbit - Undip. <https://doi.org/979.704.015.1>
- Hibatullah, Afgan Yuan, & Sofianty, Diamonalisa. (2022). Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN. *Accountancy*, 2(1), 862–868.
- Ilham, Ilham, Den Ka, Veronika Sari, & Asriadi, Nur Muhammad. (2020). Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN, Dan STP PPN Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i2.2191>
- Junianto, Setiawan, Harimurti, Fadjar, & Suharno. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16, 311–321.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018* (Maya (ed.); XIX). Andi.
- Maulidya, Hany Ayu Rahma, Maslichah, & Mahsuni, Abdul Wahid. (2021). Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah Dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Djp Jawa Timur Iii. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Muhid, Abdul. (2019). Analisis Statistik. In Dona Nur Hidayat (Ed.), *Journal of Chemical Information and Modeling* (Edisi ke 2, Vol. 53, Issue 9). Zifatama Jawara.
- Natsir, M. (2012). Ekonomi Moneter Teori & Kebijakan. In Sutowo Latief (Ed.), *Ekonomi Moneter* (Cetakan Pe). Polines Semarang. 978-979-3514-60-4
- Nurpermana, Adi, Mita, Dyah Eras, Setyaningrum, Presty, & Kie, Sally Devina. (2019). *Pajak Pertambahan Nilai* (Vol. 1). Mekari.
- Pahala, Alif Aldiat, & Muslih, Muhammad. (2020). Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Jawa Barat Bandung Tahun 2015 - 2018). *E-Proceeding Og Management*, 7(2), 3083–3090.
- Pane, Yonson, & Avelina, Sherly. (2022). Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 8(1), 53–62.
- Paramita, Ratna Wijayanti Dinar, Rizal, Noviansyah, & Sulistyan, Riza Bahtiar. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Mursyid & Abu Zyan el Mazwa (eds.); Edisi Ket). Widya Gama Press.
- Parera, Agoes. (2021). *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Retno Ayu Kusumaningtyas (ed.)). Bumi Aksara.

- Pohan, Chairil Anwar. (2016). Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. In *PT. Gramedia pustaka utama*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pujiwidodo, Hartanti Dwiymoko. (2018). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Manajemen Keuangan BSI Jakarta, A., & Angel Nikita Sianturi. *Sikap*, 3(1), 63–73.
- Puspitha, Putu Vilia, & Supadmi, Ni Luh. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi pada Penerimaan PPN (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak se-Bali). *Jurnal Akuntansi*, 22, 1530–1556.
- Resmi, Siti. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi. In *Salemba Empat*.
- Rochaety, Eti, Ratih, Tresnati, & Latief, Abdul Madjid. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis: Dengan Aplikasi SPSS* (Edisi 2). Mitra Wacana Media.
- Sapridawati, Y., Indrawati, N., Sofyan, Azhari, & Zirman. (2021). *Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. 2(1), 75–93.
- Setiadi. (2022). *Buku Praktikum Pajak*. Penerbit Qiara Media.
- Sihombing, Sotarduga, & Alestria, Sibagariangsusy. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In *Widina* (Vol. 44, Issue 8). Widina Bhakti Persada.
- Simorangkir, Iskandar, & Suseno. (2004). Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar. *Seri Kebanksentralan*, 12(12), 61.
- Sinambela, Tongam, & Rahmawati, Suci. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5(1), 83–97.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif dan Kombinasi. In *Alfabeta* (Cetakan 10). CV. Alfabeta.
- Sulistyowati, Nur Wahyuning, Amah, Nik, & Styaningrum, Farida. (2018). Pajak Pertambahan Nilai : Teori & Praktik. In Nur Wahyuning Sulistyowati (Ed.), *UNIMPA PRESS* (Vol. 7, Issue 1). UNIPMA PRESS.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis : Untuk Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Aditya Cristian (ed.)). Andi.
- Syarifuddin, Ferry. (2015). Konsep, Dinamika dan Respon Kebijakan Nilai Tukar Di Indonesia. *Bank Indonesia*, 24, 1–101.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1984). *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang Undang* (Issue 1, pp. 1–5).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah* (Vol. 45, Issue 3, pp. 1–19).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2015). *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014* (Vol. 3, Issue April, pp. 49–58).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). *Harmonisasi Peraturan Perpajakan* (p. 104).
- Utari, G. A. Diah, Cristina, Retni, & Pambudi, Sudiro. (2015). Inflasi di Indonesia : Karakteristik dan Pengendaliannya. *Bank Indonesia Institute*, 23(23), 1–64.
- Widana, I. Wayan, & Muliani, Putu Lia. (2020). Uji Persyaratan Analisis. In Teddy Fiktorius (Ed.), *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang*.

Klik Media.

- Widnyana, I. Wayan. (2018). *Perpajakan* (Putu Noah Aletheia Adnyana (ed.)). CV. Noah Aletheia.
- Windha, Innaka, & Aulia, Yoosita. (2021). Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kpp Mulyorejo Surabaya). *Jurnal Pabean*, 3(1).